

## Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN 2015

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN yang terdiri dari sejumlah perwakilan masyarakat sipil Indonesia, yang terdiri dari Human Rights Working Group (HRWG), Institute for Essential Service Reform (IESR), International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Solidaritas Perempuan, Indonesia for Human, Arus Pelangi, SAPA Indonesia, Pergerakan Indonesia, LBH Jogjakarta, SKPKC Fransiskan Papua, KKSP Medan, LBH Makassar, GAYa NUSANTARA, Indonesia Against Trafficking, Perempuan Mahardhika, Aliansi Remaja Indonesia, Yayasan Intermedika, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan beberapa lembaga dan individu yang selama ini aktif mengadvokasi isu-isu masyarakat sipil di Indonesia, telah mengadakan konsolidasi sekaligus dialog strategis dengan Perwakilan Pemerintah RI di Wisma PKBI Jakarta Selatan pada 25-27 Februari 2014 membahas mengenai rencana pembentukan Komunitas ASEAN 2015.

Konsolidasi tersebut telah menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dan mendesak untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah RI di ASEAN, yang berfokus pada kerja sama bidang politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya, di mana upaya pembentukan komunitas ASEAN tersebut masih jauh dari pelibatan masyarakat sipil. Sementara, komunitas ASEAN yang dimulai pada akhir 2015 akan mempengaruhi lebih sekitar 600 juta jiwa masyarakat yang hidup di Asia Tenggara.

Pada bidang kerja sama politik dan keamanan, menyadari bahwa masih adanya prinsip-prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan secara konsensus di ASEAN, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Komunitas ASEAN 2015 mendesak pemerintah RI untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak akan menghambat kerjasama politik dan keamanan di mana salahsatu agendanya adalah menjadikan ASEAN sebagai “*A Rule Based Community of Shared Values and Norms*” yang mendukung kerjasama promosi dan perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik dan promosi prinsip-prinsip demokrasi. Untuk itu, Koalisi merekomendasikan kepada Pemerintah RI untuk:

1. Memajukan kerja sama di tingkat regional dalam upaya pemberantasan korupsi, misalnya dengan mendorong kerja sama ekstradisi, dan penyelamatan uang dan asset negara.
2. Memperkuat mekanisme HAM ASEAN dengan menunjukkan kepemimpinan dalam pembahasan ulang agenda (*review*) kerangka acuan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) dengan memperkuat mandat perlindungan HAM yang dimiliki oleh AICHR, seperti: AICHR dapat menerima pengaduan kasus-kasus pelanggaran HAM, dapat membentuk tim pencari fakta kasus-kasus HAM

di ASEAN, mendukung upaya seleksi dan rekrutmen bagi wakil AICHR di semua negara ASEAN dari kalangan independen, memberikan kewenangan bagi AICHR untuk melakukan pengamatan (*monitoring*) dan evaluasi kasus-kasus pelanggaran HAM serta mendorong terbentuknya pengadilan HAM di ASEAN, khususnya untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus memastikan AICHR dapat menyelesaikan agenda panduan pelibatan masyarakat sipil dengan AICHR.

3. Memastikan akuntabilitas dalam setiap status kerja sama ASEAN dengan membuka informasi ke publik, serta pelibatan masyarakat sipil dalam setiap pengambilan keputusan di ASEAN.
4. Mendorong terbentuknya mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya menyediakan akses remedi dan bantuan hukum bagi para korban dan kelompok-kelompok yang termarginalkan akibat integrasi ASEAN.

Kerja sama Ekonomi ASEAN dapat dikatakan sebagai pilar dengan persiapan paling matang dalam kerangka pembentukan Komunitas ASEAN. Sayangnya, persiapan tersebut tidak mengakomodasi sejumlah isu yang cukup kritis terkait kerja sama ekonomi. Di sektor mineral dan energi misalnya, kelompok masyarakat sipil menyadari bahwa sektor pertambangan memiliki sejumlah permasalahan terkait dengan minimnya implementasi prinsip tata kelola yang baik dalam praktik-praktik industri ekstraktif. Minimnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam praktik industri ekstraktif kemudian berimbas pada sejumlah kerugian seperti kerusakan lingkungan, dampak sosial bagi masyarakat lokal, serta tidak maksimalnya industri ekstraktif dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam sektor perdagangan, isu persaingan produk strategis dengan negara-negara ASEAN lain merupakan momok bagi masyarakat, terutama kelompok petani dan peternak. Pada bidang kerja sama masyarakat ekonomi ASEAN, menyadari akan adanya implikasi pergerakan bebas barang dan jasa serta modal, juga adanya ketimpangan ekonomi, maka Koalisi merekomendasikan Pemerintah RI untuk:

1. Memastikan bahwa setiap kerja sama ekonomi harus menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia
2. Memastikan prinsip partisipasi bagi masyarakat sipil untuk mendorong akuntabilitas dalam setiap kerja sama ekonomi ASEAN serta mengakomodasi kepentingan masyarakat yang lebih luas
3. Memastikan bahwa setiap investasi harus berperspektif keberlanjutan, tunduk pada sistem hukum yang berlaku, ramah lingkungan, dan membawa manfaat bagi masyarakat setempat
4. Memastikan rencana kerja untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di antara negara-negara ASEAN

5. Memainkan peranan kepemimpinan dalam mendorong transparansi di berbagai lini, terutama di sektor pertambangan dengan mempromosikan implementasi Inisiatif Transparansi Pendapatan Industri Ekstraktif (EITI)
6. Membuat mekanisme *safeguard* dalam sektor perdagangan yang bisa diterapkan jelang integrasi ekonomi ASEAN terutama bagi para petani dan nelayan dan memastikan kedaulatan pangan
7. Mengarusutamakan gerakan transparansi dan anti korupsi di setiap lini kerja sama di pilar ekonomi.
8. Membuat riset dampak dari pembangunan masyarakat ekonomi ASEAN yang melibatkan masyarakat sipil secara luas serta lembaga kajian ilmiah.

Pada bidang kerja sama sosial-budaya, mengingat ASEAN akan membentuk satu identitas ASEAN, maka Koalisi, ingin merekomendasikan Pemerintah RI untuk mendefinisikan ASEAN sebagai:

1. Komunitas yang menghargai dan menjunjung tinggi HAM
2. Komunitas yang anti diskriminasi
3. Komunitas yang tidak memberikan toleransi bagi para pelaku kekerasan seksual
4. Komunitas yang menghargai perbedaan
5. Komunitas yang memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan dan yang selama ini termarginalkan, seperti rakyat miskin, kelompok difabel (PWD), minoritas agama, masyarakat adat, minoritas *sexual orientation and gender identity*, perempuan dan anak.
6. Komunitas yang berdaulat dan mandiri dibidang kesehatan untuk memastikan produksi dan distribusi obat dan alat kesehatan yang murah dan terjangkau diseluruh negara Asean
7. Komunitas yang memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan
8. Komunitas yang memberikan kemudahan akses informasi yang seluas-luasnya
9. Komunitas yang memiliki semangat gotong-royong,
10. Komunitas yang memberikan peluang bagi remaja/ orang muda untuk terlibat secara bermakna dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya

Harapannya, dengan rekomendasi tersebut, ASEAN menjadi lebih relevan, transparan, partisipatif, inklusif, dan akuntabel dan tidak ditinggalkan masyarakatnya. Rekomendasi ini juga ditujukan untuk memberi masukan dalam penyusunan *Blueprint ASEAN Post-2015*.

Jakarta, 27 Februari 2014

**Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN 2015**